

KONFERENSI ASIA-AFRIKA, GERAKAN NON BLOK DAN INGATAN KOLEKTIF BANGSA INDONESIA

Wawancara tertulis Darwis Khudori dengan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)

Desember 2013

Catatan pendahuluan

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, khususnya nomor 1 sampai 5, sesungguhnya bisa didapat di berbagai buku dan artikel ilmiah yang sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa, baik Indonesia, Inggris, Prancis, maupun bahasa-bahasa lainnya. Karena itu, sesungguhnya tidak ada yang baru dari jawaban-jawaban saya di bawah ini sebab merupakan kutipan-kutipan saja dari buku-buku dan artikel-artikel dari berbagai bahasa yang sudah saya baca tentang KAA dan GNB. Pada akhir wawancara, saya lampirkan daftar buku dan artikel yang paling relevan tentang KAA dan GNB yang menjadi sumber kutipan-kutipan saya.

1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan salah satu prestasi bangsa Indonesia dalam kancah diplomasi luar negeri. Apa yang melatarbelakangi penyelenggaraan KAA?

Latar belakang KAA itu tidak tunggal melainkan majemuk berlapis-lapis tumpang-tindih, ada yang bersifat global, regional, internasional, nasional, lokal, dsb. Yang paling terkenal tentunya situasi dunia yang diwarnai oleh Perang Dingin antara Blok Barat (USA, Eropa Barat dan negara-negara kapitalis dan satelitnya) dan Blok Timur (URSS, RRT dan negara-negara sosialis/komunis lainnya). Ketegangannya sangat tinggi dengan resiko Perang Dunia Ketiga yang diperkirakan lebih dahsyat daripada Perang Dunia Kedua sebab kedua blok yang bersengketa memiliki bom nuklir yang lebih mengerikan daripada yang dipakai untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Masing-masing blok berusaha dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang kotor, untuk menarik negara-negara di Asia dan Afrika yang baru saja merdeka untuk bergabung ke dalam bloknya. Sementara itu, rakyat-rakyat di Asia dan Afrika yang merupakan dua pertiga penduduk dunia masih mengalami keterkebelakangan, kemiskinan, kelaparan, epidemi,... sebagai akibat dari peperangan, penjajahan dan perbudakan selama puluhan bahkan ratusan tahun yang didalangi dan dilakukan oleh negara-negara yang kemudian membentuk Blok Barat. Sebagian dari pemimpin negara-negara yang baru saja merdeka menyadari bahwa perang dingin antara kedua blok itu bukan prioritas kalau bukan urusan mereka sama sekali. Prioritas mereka adalah membebaskan diri dari dominasi negara-negara adidaya dan membangun negara mereka masing-masing berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Indonesia sendiri sudah menetapkan kebijakan luar negerinya sejak awal masa kemerdekaannya (pidato Bung Hatta pada tahun 1948) yang mendapat nama "bebas aktif" pada awal tahun 50-an (Program Kabinet Sukiman tahun 1952 dan pidato Bung Karno 17 Agustus 1952), artinya tidak berpihak kepada blok manapun, tidak berdasarkan kepentingan asing, tetapi ikut aktif dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi dan menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, sebagaimana tersurat dalam UUD-nya. Pada tahun limapuluhan, Indonesia belum sepenuhnya merdeka, kuku-kuku penjajah masih mencengkeram di berbagai sektor, perbedaan aliran-aliran politik menjelma menjadi ketegangan bahkan konflik bersenjata, sebagian kekuatan politik didukung oleh Blok Barat, ada pula yang disokong oleh Blok Timur, Irian Barat masih disandera oleh Belanda. Tapi di luar perbedaan aliran-aliran politik dalam negeri, para pemimpin Indonesia pada tahun limapuluhan secara umum disatukan oleh semangat yang sama: anti penjajahan, anti dominasi asing, solidaritas dengan bangsa-bangsa terjajah, kedaulatan rakyat, bangsa dan negara dalam pembangunan. Semua itu, dan masih ada lagi unsur-unsur lain yang tidak perlu kita ceritakan dalam wawancara ringkas ini, bergabung menjadi kekuatan yang memungkinkan lahirnya KAA.

2. Bagaimana pelaksanaan dan hasil dari KAA?

Pertanyaan ini sulit dijawab sebab terlalu luas dan tidak jelas (dalam bahasa Jawa “nggrambyang”). Pelaksanaan KAA itu merupakan proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aktor, melalui berbagai tahap, meliputi berbagai pertemuan dan sidang, menyangkut masalah tempat, fasilitas, perlengkapan, transport, penginapan, makanan, keamanan, kesehatan, komunikasi, dsb. Jadi, sejauh mana pertanyaan ini musti dijawab? Tidak mungkin menguraikan semua itu dalam wawancara pendek ini. Apalagi uraian tentang pelaksanaan KAA itu sudah ditulis secara terperinci dalam berbagai penerbitan, terutama oleh Bapak H. Roeslan Abdulgani yang menjadi sekretaris umum KAA, dalam bukunya “The Bandung Connection”. Tulisannya tidak sekadar terperinci, melainkan juga sangat hidup dan menarik, diselengi dengan berbagai anekdot. Demikian pula hasil KAA sudah ditulis dan dikutip berulang kali dalam berbagai buku dan artikel dalam bermacam-macam bahasa. Saya kira menguraikan kembali atau menyebut Dasa Sila Bandung saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini, sebab Dasa Sila Bandung itu hanya merupakan sebagian kecil dari hasil KAA yang berjudul “Final Communiqué” dan yang sudah dimuat dalam berbagai penerbitan termasuk dalam bentuk digital yang bisa diperoleh dengan mudah melalui internet.

3. Apa implikasi penyelenggaraan KAA bagi kemajuan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia?

KAA memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Dampak langsungnya ada dua. Yang pertama adalah penandatanganan Kesepakatan Kewarganegaraan Ganda (Dual Nationality Agreement) antara Indonesia dan RRT. Menurut kesepakatan ini, orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia akan diharuskan memilih antara menjadi warganegara Indonesia atau Tiongkok. Ini dianggap sebagai konsesi Tiongkok terhadap Indonesia, tapi juga menjadi pola penyelesaian masalah yang sama di berbagai negara di Asia Tenggara, sebab sebelumnya Tiongkok mengklaim bahwa semua keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia (di negara-negara lainnya) adalah warganegara Tiongkok. Penandatanganan ini juga menandai mendekatnya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Yang kedua adalah dukungan bulat dari seluruh negara peserta KAA kepada Indonesia dalam menuntut haknya atas Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Dukungan ini bahkan dicantumkan secara jelas di dalam Final Communiqué KAA.

Dampak tak langsungnya tak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting, bagi peran Indonesia dalam kancah internasional. Sebut saja misalnya: A) KAA melahirkan istilah “Bandung Spirit” yang merupakan seruan demi ko-eksistensi damai antarbangsa, demi pembebasan dunia dari struktur dominasi antarnegara, demi solidaritas bagi bangsa-bangsa yang terjajah, lemah atau dilemahkan oleh tata dunia yang tidak adil. Istilah “Bandung Spirit” ini kemudian menjadi rujukan gerakan-gerakan sosial dan politik di tingkat rakyat ataupun negara di mana-mana yang berkonotasi “progressif revolusioner”, anti-kolonialisme, anti-imperialisme, demi kemerdekaan, demi kedaulatan nasional, demi keadilan sosial, demi solidaritas bagi rakyat yang tertindas, demi perdamaian. B) Indonesia dihargai sebagai jembatan, perantara atau fasilitator hubungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sebab banyak anggota delegasi negara-negara peserta KAA tidak saling mengenal sebelumnya. Berkat KAA, mereka berkenalan, hidup bersama, bekerja bersama, makan bersama selama beberapa hari. Persahabatan yang ditimbulkannya menjadi modal diplomasi kreatif dan inovatif negara-negara Asia dan Afrika di tingkat PBB pada masa-masa selanjutnya. C) KAA berhasil mengurangi ketegangan-ketegangan politik antara kedua blok yang bersengketa. RRT menyatakan jaminannya untuk tidak menyerang tetangga-tetangganya dan menawarkan dialog langsung dengan AS dalam masalah Taiwan. Filipina, Pakistan dan Thailand yang pro-Barat mengurangi kecondongannya kepada Blok Barat. AS terpaksa merevisi kebijakan luar negerinya di Asia dan Afrika, termasuk meningkatkan bantuan dananya bagi pembangunan di Asia dan Afrika. D) KAA melahirkan gerakan-gerakan solidaritas Asia-Afrika di tingkat rakyat dan negara, memunculkan Kelompok Asia-Afrika di PBB untuk memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa

Asia dan Afrika, memicu gelombang pencapaian kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika dari penjajahan (30 an negara Afrika meraih kemerdekaannya antara 1955-1965), mendorong diterimanya semua negara merdeka menjadi anggota PBB (termasuk Jepang dan RRT). E) KAA telah melahirkan blok tersendiri dalam tata dunia yang didominasi oleh Blok Barat dan Blok Timur, yakni blok ketiga yang kemudian secara resmi menjadi Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement) pada tahun 1961 di mana Indonesia menjadi salah satu pelopornya sesuai dengan prinsip politik luar negerinya yang “bebas aktif”. Karena itu KAA juga disebut sebagai tanggal lahir Dunia Ketiga. Di samping Gerakan Non-Blok, KAA juga merangsang lahirnya Kelompok Trikontinental (Asia, Afrika dan Amerika Latin) pada tahun 1966 yang merupakan gerakan revolusioner melawan kolonialisme dan imperialisme menuju tata dunia baru yang adil dan damai. F) Indonesia diangkat secara tidak langsung menjadi juru bicara Gerakan Non-Blok dan negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka dan yang masih terjajah, terutama berkat keberanian, keaktifan, karisma dan retorika Presiden Soekarno. G). KAA telah melahirkan sebuah periode dalam sejarah dunia yang disebut Era Bandung, yakni perioda di mana negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka berhasil melaksanakan pembangunan nasional yang berdaulat berdasarkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara masing-masing, bukan kepentingan asing. Era Bandung ini merupakan masa kejayaan Dunia Ketiga sebab negara-negara anggota Non-Blok berhasil mengambil keuntungan dari kedua blok adidaya yang bersengketa sehingga bukan mereka yang harus menyesuaikan diri pada kepentingan negara-negara adidaya, tapi sebaliknya, negara-negara adidialah yang terpaksa menyesuaikan diri pada tuntutan negara-negara Dunia Ketiga. Tapi Era Bandung ini berakhir secara tragis dengan digulingkannya pemimpin-pemimpin gerakan Asia-Afrika (Soekarno, Nasser, U-Nu, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah,...), aborsi proyek-proyek pembangunan nasional mereka yang berdaulat dan masuknya negara-negara Dunia Ketiga ke dalam orbit Blok Barat. G) Dalam perspektif sejarah global yang didominasi oleh sistem kapitalisme yang sudah bercokol di dunia sekurang-kurangnya sejak abad ke-16, menurut Prof. Samir Amin, KAA dapat dilihat sebagai naiknya gelombang pasang pertama dari gerakan terorganisir bangsa-bangsa “Selatan” atau “pinggiran” (periphery) melawan “Utara” atau “pusat” (centre) dari kapitalisme dan imperialisme. Gelombang ini mengalami masa surut pada tahun 70-an (akhir Era Bandung), sedangkan gelombang kapitalisme global mengalami pasang naik hingga akhir abad ke-20, lalu surut lagi dengan krisis yang berkepanjangan, dan fajar baru mulai menyingsing bagi naiknya kembali gelombang pasang bangsa-bangsa “Selatan” atau “pinggiran”. Dan gelombang pasang yang kedua ini diperkirakan akan menjadi lebih dahsyat daripada gelombang pasang yang pertama sebab gelombang ini tidak hanya digerakkan oleh bangsa-bangsa Selatan, melainkan juga oleh kelompok-kelompok “pro-perubahan” di Utara.

4. Prestasi lain Indonesia adalah menjadi salah satu pendiri Gerakan Non Blok. Apa latar belakang keterlibatan Indonesia dalam GNB?

Seperti juga dengan KAA, latar belakang keterlibatan Indonesia dalam GNB juga tidak tunggal. Yang paling mendasar adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif” seperti disebutkan di atas, yang sudah dicetuskan sejak akhir tahun 40-an dan dimantapkan sepanjang tahun 50-an. Istilah “bebas aktif” itu menurut Bapak Roeslan Abdulgani mengandung unsur-unsur “anti-kolonialisme, pro-kemerdekaan, pro-perdamaian, tidak mengikat diri kepada salah satu blok militer, dan kerja sama atas dasar hidup berdampingan secara damai”. Latar belakang lainnya adalah Gerakan Asia-Afrika yang terus tumbuh dan berkembang melalui organisasi-organisasi Asia-Afrika dalam berbagai kategori (mahasiswa, wartawan, penulis,...) serta pertemuan-pertemuan Asia-Afrika di Kairo, Jakarta, Conakry, dsb. Dalam semua kegiatan itu Indonesia dan Bung Karno memegang peranan penting sebagai pelopor. Sementara itu ketegangan konflik antara Blok Barat dan Blok Timur meningkat pada akhir tahun 50-an. Khrushchev mengancam Blok Barat secara terang-terangan dan berkali-kali dengan senjata nuklir yang katanya mampu memusnahkan kota-kota di Amerika dan Eropa. Prihatin akan keadaan ini, lima kepala negara yang berhaluan non-blok (Nasser, Nehru, Nkrumah, Soekarno dan Tito) sepakat untuk menyerukan perundingan antara Eisenhower dan Khrushchev melalui forum PBB untuk meredakan ketegangan yang memuncak.

Seruan ini disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya di PBB tanggal 30 September 1960 yang berjudul "To build the world anew". Seruan kelima kepala negara ini tidak dihiraukan oleh kedua kekuatan adidaya yang bersengketa. Maka, atas inisiatif Tito bersama dengan Nasser, Nehru, Nkrumah dan Soekarno, diselenggarakanlah "Konferensi Kepala-kepala Negara atau Pemerintah Negara-negara Non-Blok" yang pertama di Beograd pada tanggal 1-6 September 1961. Konferensi ini kemudian dikenal sebagai kelahiran Gerakan Non-Blok.

5. Apa implikasi keterlibatan Indonesia dalam GNB bagi kemajuan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia?

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, peran Indonesia dalam GNB boleh disebut "high profile". Di samping sebagai pendiri, Soekarno juga ditugaskan untuk menyampaikan tujuan dan hasil Konferensi Non-Blok kepada Presiden AS Kennedy di Washington pada tanggal 12 September 1961. Soekarno mencoba memperkenalkan konsep perjuangan baru kepada GNB, konsep yang membagi dunia ke dalam dua kubu yang bertarung, yakni NEFO (New Emerging Forces, negara-negara yang baru merdeka dari jajahan negara-negara kapitalis imperialis) dan OLDEFO (Old Established Forces, negara-negara kapitalis imperialis yang ingin melanggengkan dominasinya). Dalam kerangka konsep itu pula Soekarno mendirikan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan Olympic Games dan CONEFO (Conference of the the New Emerging Forces) sebagai tandingan PBB. GANEFO yang pertama berhasil diselenggarakan di Jakarta pada bulan Nopember 1963. Sedangkan CONEFO yang direncanakan dilangsungkan pada akhir tahun 1966 gagal dilaksanakan karena Bung Karno digulingkan dari kedudukannya pada tahun 1965-1966. Di bawah kepemimpinan Soeharto, orientasi politik luar negeri Indonesia berbalik dari kecondongannya ke Blok Timur ke kecondongan ke Blok Barat. Peran Indonesia dalam kancah dunia boleh dikatakan "low profile". Indonesia seperti menarik diri dari hingar bingar masalah dunia untuk lebih berkonsentrasi pada masalah nasional dan regional dengan turut mendirikan ASEAN. Baru setelah konsolidasi nasional dirasakan cukup, Indonesia mulai memasuki lagi kancah internasional, dimulai dengan memimpin GNB pada tahun 1992 yang dianggap berhasil melancarkan dialog Utara-Selatan dan kerja sama Selatan-Selatan.

6. Penyelenggaraan KAA dan keterlibatan Indonesia dalam GNB merupakan prestasi bangsa Indonesia di kancah internasional. Kedua momentum ini terekam dalam arsip yang sebagian tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Bagaimana seharusnya ANRI melestarikan arsip tersebut?

Pertanyaan ini terlalu umum dan jawabannya umum pula, yakni semua arsip perlu disimpan sebaik-baiknya. Apakah arsip penyelenggaraan KAA perlu diperlakukan secara khusus? Mungkin tidak perlu. Yang diperlukan mungkin kegiatan peringatan HUT KAA secara berkala dengan pameran, seminar dan perlombaan untuk anak-anak dan remaja dengan memanfaatkan arsip KAA. ANRI bisa melakukan hal ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya perlombaan membacakan naskah pidato pembukaan KAA-nya Bung Karno yang dahsyat itu untuk kalangan remaja. Naskah pidato Bung Karno itu salah satu dari naskah-naskah pidato yang sangat indah, baik dari segi bahasanya maupun isinya. Dengan membacakan naskah pidato tsb. para remaja kita akan mempelajari bahasanya, retorikanya, pengucapannya, intonasinya, artikulasinya, tapi juga isinya yang mengandung ajaran sejarah dan moral yang tinggi. Kegiatan semacam ini bisa dilakukan pada tingkat lokal, tapi bisa pula nasional, bahkan internasional, sebagai bagian dari kiprah diplomasi Indonesia di kancah dunia.

7. Saat ini ANRI tengah mengusung arsip KAA dan GNB untuk menjadi Memory of the World UNESCO. Bagaimana Bapak memandang hal ini?

Ini sebuah prakarsa yang baik dan perlu. Pengusulan ini akan menjadi lebih kuat apabila mendapat dukungan dari kalangan akademisi internasional, sebab suara kalangan akademisilah yang menjadi rujukan utama Komisi MOW UNESCO dalam mengambil keputusan lolos dan tidaknya sebuah

usulan. Karena itu perlu diselenggarakan seminar internasional tentang KAA dan GNB sebagai MOW, dengan melibatkan ahli-ahli yang dikenal di tingkat internasional, dan hasilnya dipublikasikan dalam bahasa internasional (misalnya Inggris dan Prancis) melalui media yang memadai. Seminar-seminar itu bisa diselenggarakan misalnya di Indonesia (tempat diselenggarakannya KAA), di Beograd (tempat didirikannya GNB) dan di Paris (kota yang ditempati kantor pusat UNESCO).

8. Apa harapan Bapak kepada ANRI sebagai lembaga pelestari memori kolektif yang merekam prestasi bangsa Indonesia?

Harapan saya, dapatlah ANRI melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, baik dari segi pengorganisasian dan penyimpanan arsipnya maupun dari segi pelayanannya kepada publik.

Daftar Rujukan Wawancara

ABDULGANI Dr. H. Roeslan, *Pegangan Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta, Universitas Nasional, 1976-1977.

ABDULGANI Dr. H. Roeslan, *Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Bebas Aktif*. Yogyakarta, Seminar 40 Tahun Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Litbang Deplu dan UGM, 1988.

ABDULGANI Dr. H. Roeslan, *The Bandung Connection: Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955*. Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 1980. Diterbitkan kembali oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2011 dan 2013.

AMIN Samir, *L'éveil du Sud : l'ère de Bandoung, 1955-1980 : panorama politique et personnel de l'époque*. Pantin, Le Temps des cerises, 2008.

AMIN Samir, *L'histoire globale : une perspective afro-asiatique*. Paris, Les Indes savantes, 2013.

ANWAR Dewi Fortuna, "Indonesia and the Bandung Conference, then and now" in TAN See Seng and ACHARYA Amitav (eds.), *Bandung revisited: the legacy of the 1955 Asian-African Conference for international order*. Singapore, NUS Press, 2008.

GHALI Boutros Boutros, *Le mouvement afro-asiatique*. Paris, Presses universitaires de France, 1969.

SMETS Paul F., *De Bandoeng à Moshi : contribution à l'étude des conférences afro-asiatiques (1955-1963)*. Bruxelles, Université libre de Bruxelles, Institut de sociologie, 1964.